

# MENINGKATKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, AKTUALISASI OTONOMI PENDIDIKAN DAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN

Oleh  
Rochmat Wahab

## **Pengantar**

Indonesia dewasa ini menghadapi dua persoalan penting yang tidak dapat dihindari, yaitu persoalan internal berkenaan dengan kondisi krisis multidimensional dan adanya gerakan reformasi, dan persoalan eksternal berkenaan dengan perdagangan bebas dan gerakan globalisasi. Diyakini bahwa untuk menghadapi persoalan ini upaya yang paling efektif adalah strategi pendidikan, karena pendidikan dipandang mampu memenuhi *capacity building*, baik personal maupun institusional.

Menyadari akan eksistensi pendidikan dalam proses pembangunan bangsa Indonesia, maka pembaharuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya yang harus dilakukan, sehingga dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dan akan terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah substansi UU Sisdiknas relatif berbeda dengan substansi UU Sisdiknas sebelumnya, karena sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi.

Untuk dapat memahami Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa implikasinya, maka selanjutnya akan di bahas lebih lanjut.

## **Memahami Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam memahami Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), setidaknya ada beberapa poin penting, di antaranya hakekat pendidikan, tujuan pendidikan nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, subjek pendidikan,

---

*\*Disajikan dan dibahas dalam Seminar Nasional Pendidikan, yang diselenggarakan oleh PP Al-Ihya Ulumuddin dan BEM Institut Agama Islam Al-Ghazali, Cilacap pada tanggal 12 Agustus 2004.*

ketenagaan, kurikulum, kelembagaan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat Pertama, hakekat pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya sadar dalam mendewasakan individu sebagai co-subjek objek, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan individu dapat mewujudkan dirinya sesuai dengan fitrahnya, baik sebagai hamba Tuhan dan khalifah di atas bumi. Karena itu diupayakan jangan sampai terjadi reduksi pemahaman, sehingga hakekat pendidikan memiliki makna tidak lebih baik daripada pengajaran (*instruction*).

Selanjutnya bahwa sadar akan tujuan nasional, maka tujuan pendidikan nasional lebih difokuskan pada usaha membentuk manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia yang mampu menunjukkan sebagai hamba Tuhan yang memiliki jati diri dan kemandirian, sebagai makhluk Tuhan termulia yang memiliki kesalehan sosial, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi manusia lainnya, melainkan juga bagi keseluruhan lingkungan yang melingkupi dirinya. Kandungan makna di balik rumusan tujuan pendidikan nasional adalah sangat luas dan kaya, namun semuanya itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk merealisasikannya, karena pada kenyataan historis bahwa menjabarkannya ke dalam rencana tindakan merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit.

Ketiga, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu substansi yang dipandang sangat esensial dalam melandasi model sistem pendidikan nasional yang pada UU Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya tidak pernah ada. Dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dirumuskan sejumlah kata, frase, dan kalimat kunci yang sangat penting dalam menegakkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan sehingga benar-benar mampu mengantarkan setiap insan manusia menjadi warga negara yang bermartabat. Beberapa prinsip-prinsip yang patut diangkat, di antaranya bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; pendidikan diselenggarakan dengan

mengacu pada ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani; dan sebagainya. Namun nilai-nilai luhur yang terkandung tersebut pada kenyataannya tidaklah mudah untuk meaktualisasikannya. Untuk itu perlu upaya bersama yang sinergis dan produktif dalam mensukseskannya.

Keempat, bahwa subjek pendidikan mencakup semua anak bangsa tanpa dikecualikan oleh potensi, karakteristik, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Hal ini merupakan konsekuensi logis demokrasi yang ditegakkan. Secara jujur untuk merealisasikannya yang ideal tidaklah mudah. Untuk itulah dibutuhkan suatu pengorbanan yang tulus dari semua pihak, terutama orangtua, guru, sekolah, dunia industri dan bisnis.

Kelima, bahwa ketenagaan dalam melayani anak di jenis pendidikan apapun dibutuhkan tenaga yang handal dan profesional. Karena tidak sedikit ditemukan di lapangan, bahwa secara kuantitatif sudah tersedia tenaga gurunya secara memadai, namun secara kualitatif kondisi dan kinerja tenaga masih belum banyak yang memenuhi kriteria kompetensi minimal. Karena itu pembuatan program pembinaan perlu terus diupayakan.

### **Aktualisasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam Otonomi Pendidikan**

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan ada sejumlah aspek penting, terutama dikaitkan dengan otonomi pendidikan. *Pertama*, debirokratisasi. Menyadari akan berbagai hambatan sistem dan birokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dalam era otonomi pendidikan banyak hal yang ditinjau ulang berbagai aturan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, di samping pembuatan keputusan dalam pembuatan program pendidikan dan implementasinya. Upaya yang demikian dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Hanya saja perlu dicermati bahwa tidak semua orang yang diserahi dalam birokrasi pendidikan memiliki kualifikasi yang sesuai, sehingga debirokratisasi justru menimbulkan banyak pemborosan yang tidak harus terjadi.

*Kedua*, desentralisasi dan dekonsentrasi. Diasumsikan bahwa ujung tombak pendidikan di daerah lah yang jauh lebih mengetahui kondisi obyektif dan potensi daerahnya sendiri, sehingga desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan cara yang lebih efektif dalam mengembangkan pengelolaan birokrasi pendidikan. Perencanaan yang dibuat dari bawah dengan mempertimbangkan visi dan misi pendidikan nasional, diharapkan dapat menghasilkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan. Pada prakteknya daerah sudah mampu membuat program sesuai dengan kebutuhannya, walaupun masih jauh dari ideal, karena masih ada sejumlah daerah yang masih mengandalkan program yang dibuat pusat.

*Ketiga*, Manajemen Berbasis Sekolah. Berdasarkan UU Sisdiknas, manajemen pendidikan bertumpu pada sekolah, artinya bahwa kepala sekolah dan guru merupakan tumpuan membangun kualitas pendidikan, dengan dukungan orangtua dan masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah memiliki kebebasan yang tinggi dalam menentukan visi dan misinya. Hanya saja sampai kini baru sejumlah kecil sekolah yang sudah mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan program dan melaksanakannya. Yang demikian terjadi diduga bisa disebabkan oleh rasa terbelenggu oleh cara lama, keengganan untuyk berubah, atau kekurangberanian membuat keputusan baru.

*Keempat*, Otonomi Kampus. Kampus, terutama sebagai intitusi pendidikan tinggi yang berstatus negeri dalam batas tertentu, menjadi bagian dari birokrasi harus menunjukkan ketundukannya kepada pemerintah. Namun kampus, tanpa memandang statusnya, merupakan wilayah kekuasaan tersendiri yang memiliki karakteritik tertentu sebagai masyarakat ilmiah. Karena itulah kampus memiliki otonomi yang sangat tinggi, terlebih-lebih dikuatkan dengan gerakan demokratisasi pendidikan. Otonomi kampus yang tinggi ternyata belum mampu menjadi contoh yang baik dalam mengembangkan demokrasi.

## **Anggaran Pendidikan berdasarkan Sisdiknas dan kemungkinan Aktualisasinya**

Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, pemerintah, atau masyarakat saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama-sama, sesuai dengan tingkat kepentingannya. Terutama untuk tingkat pendidikan dasar, pada hakekatnya lebih menjadi tanggung jawab pemerintah, karena pendidikan dasar merupakan *public goods*. Sedangkan pendidikan menengah ke atas dapat diklaim sebagai tanggung jawab bersama, bahkan masyarakat harus menopangnya, karena pendidikan menengah ke atas merupakan *private goods*.

Sungguh disayangkan, bahwa pendidikan dasar belum sepenuhnya menjadi *public goods*, karena terbukti bahwa pemerintah belum secara total mampu mengupayakan semua peserta didik pendidikan dasar terbebas dari biaya pendidikan. Apalagi untuk memenuhi tingkat kualitas tertentu. Padahal membangun pendidikan yang berkualitas secara keseluruhan harus bermula dari terbangunnya pendidikan dasar yang benar-benar berkualitas.

Perlu diketahui bahwa selama ini pendidikan lebih banyak ditopang oleh keluarga dan masyarakat. Padahal yang seharusnya menjadi *stakeholders* pendidikan juga para dunia industri dan bisnis. Oleh karena itulah dunia industri dan bisnis merupakan potensi besar dalam pendanaan pendidikan.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dewasa ini telah diupayakan pengelolaan dana pendidikan secara penuh tanggung jawab. Namun pada kenyataannya masih perlu kerja keras dalam menentukan pembagian dana secara adil dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan latar belakang.

Berdasarkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, anggaran pendidikan untuk operasional pendidikan seharusnya sekitar 20% APBN dan APBD. Angka ini secara politis sangatlah berarti, karena selama ini anggaran pendidikan tidak pernah melebihi dari 5% dari APBN dan APBD. Menurut hemat saya, angka 20%

belum menunjukkan solusi yang efektif, karena tugas pokok dan fungsi antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota berbeda. Untuk lebih fairnya, anggaran pendidikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota seharusnya lebih dari 20% dari APBD-nya, demikian pula anggaran pendidikan untuk pemerintah daerah propinsi bisa lebih kurang dari 20%-nya.

Selain daripada itu secara akademik pada dasarnya penentuan anggaran pendidikan seharusnya tidak menggunakan ukuran yang dibandingkan dengan APBN, namun yang lebih efektif, berapa unit cost setiap unit pendidikan untuk ukuran kualitas tertentu. Oleh karena itu ukuran prosentase anggaran jika dibandingkan dengan APBN, seharusnya bersifat fluktuatif tergantung pada kebutuhan untuk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan.

### **Beberapa Persoalan dan Alternatif Solusinya**

Selain dari persoalan-persoalan di atas yang perlu mendapat sorotan lebih jauh, di antaranya adalah persoalan kurikulum, metodologi, evaluasi, dan ketenagaan. **Pertama**, kurikulum. Kurikulum akhir-akhir ini menjadi sorotan semua, karena kurikulum sebagai suatu komponen pendidikan sangat mewarnai lulusan yang akan dihasilkan oleh setiap jenjang dan jenis pendidikan. Bahkan berbagai segemn masyarakat masih mempertanyakan relevansi kurikulum yang sedang dalam proses sosialisasi. Untuk dapat menjamin efektivitas kurikulum, maka upaya modifikasi desain dan implementasi kurikulum perlu terus dimatapkan, sehingga benar-benar dapat mendukung tercapainya visi dan misi pendidikan yang telah dirumuskan.

**Kedua**, metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran. Namun yang terjadi dewasa ini sebagian besar proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran konvensional yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan tujuan dan materi yang telah ditetapkan, demikian pula karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

**Ketiga**, evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sangat esensial dalam sistem pendidikan persekolahan, terutama berkenaan dengan pembuatan keputusan tentang kualitas individu dan institusi.. Hanya saja apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pendidikan evaluasi pendidikan dan pembelajaran belum dilakukan secara profesional, sehingga masih menimbulkan banyak keresahan. Bertitik tolak dari itulah maka perlu terus diupayakan adanya perbaikan sistem evaluasi, dengan melakukan penilaian secara komprehensif yang menempatkan semua domain pendidikan (afektif, kognitif, dan psikomotor) dalam posisi yang seimbang, sesuai dengan kepentingannya.

**Keempat**, ketenagaan. Banyak faktor yang ikut menentukan kualitas pendidikan, salah satunya yang sangat penting adalah keprofesionalan tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga kependidikan dewasa ini untuk semua jenjang sudah diupayakan peningkatan kualitasnya baik melalui preservice training maupun in service-training. Akan tetapi pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan, apakah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itulah ke depan perlu diupayakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga tenaga kependidikan dapat mengendalikan dan mengarahkan segala aktivitas pendidikan secara efektif dan efisien. Perlu diketahui bahwa tenaga kependidikan lainnya yang tidak kalah pentingnya, selain guru dan kepala sekolah, adalah konselor dan pengawas (supervisor). Kehadiran tenaga kependidikan ini dengan penampilan yang profesional diharapkan mampu memberikan pencerahan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

### **Implikasi bagi Penyelenggaraan Pendidikan Islam**

Setelah mengikuti uraian-uraian tersebut di atas, maka implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan Islam, di antaranya :

1. Untuk dapat membangun sistem pendidikan Islam yang mantap, kiranya diperlukan sekali suatu konstruksi filosofi dan teori pendidikan yang mantap, sehingga mampu menghasilkan insan kamil.

2. Anak sebagai subyek pendidikan seharusnya dipandang sebagai individu yang sesuai dengan fitrahnya, sehingga kehadiran dia di hadapan Allah swt setelah melalui proses pendidikan tidak tertolak dan tidak akan pernah tertolak.

3. Program pendidikan Islam akan memiliki efektivitas yang tinggi, manakala dalam pengembangan dan formulasinya mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan anak, serta tuntutan jaman dan lingkungan.

4. Metodologi pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif, manakala mempertimbangkan kasih sayang dan keteladan sebagai andalannya, dengan tetap mengakomodasi metode-metode lain yang dipandang tepat, sehingga mampu memfasilitasi terciptanya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang menyenangkan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan Islam yang selama ini sebagian besarnya dikelola secara otonom kiranya mendapat legitimasi dan penguatan, sehingga untuk dapat lebih produktifnya perlu terus diupayakan peningkatan profesionalisme manajemennya.

6. Untuk dapat menjamin keberhasilan misi pendidikan Islam, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan seharusnya menjadi syarat kunci, oleh karenanya peningkatan wawasan, keterampilan, dan perbaikan sikap dan nilai bagi tenaga kependidikan pendidikan Islam perlu terus diupayakan.

7. Evaluasi yang efektif dan bertanggung jawab bagi pendidikan Islam sebenarnya tidaklah bergantung pada aspek kognitif, melainkan yang jauh lebih penting adalah aspek afektif dan psikomotor, karena dapat dikatakan individu itu memiliki nilai yang baik untuk pendidikan agama, bukan hanya pencapaian prestasi akademiknya semata, melainkan amaliahnya yang dilakukan dengan keajegan dan kesungguhan.

8. Akhirnya bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam yang hidup matinya sangat bergantung pada dana masyarakat, kiranya sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab pendanaan pendidikan yang berada di tangan bersama,



maka sudah saatnya pemerintah dan pemerintah daerah terus meningkatkan dukungannya secara adil.

### **Penutup**

Demikianlah beberapa pokok pikiran dalam mengkritisi sistem pendidikan nasional, otonomi pendidikan dan alokasi anggaran pendidikan. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya terbatas pada rumusan konsep, melainkan yang jauh lebih penting adalah mengimplementasikannya secara bertanggung jawab. Semoga paparan ini dapat mentrigger untuk bangkitnya diskusi yang lebih hangat.

### **Daftar Pustaka**

Cetron, Marvin, and Gayle, Margaret, (1991), ***Educational Renaissance: Our Schools at the Turn of Twenty-First Century***, New York: St. Martin's Press.

Departemen Pendidikan Nasional (2003), ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional***, Jakarta:

Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi, Edit. (2001), ***Reformasi Pendidikan Dalam Otonomi Daerah***, Yogyakarta: Adi Cita.

Tilaar, H. A. R. (2000), ***Paradigma Baru Pendidikan Nasional***, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.